

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Pratiwi Sariningtyas dan Tituk Diah (2012)

Sariningtyas dan Diah (2012) meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bagi Usaha Kecil Dan Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu pemilik usaha kecil dan menengah khususnya pengusaha tour & travel yang tersebar di Surabaya Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, sedangkan variabel pendidikan pemilik dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariningtyas dan Diah (2012) adalah sama-sama meneliti standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada UKM. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariningtyas dan Diah (2012) adalah pada penelitian Sariningtyas dan Diah (2012) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan standar akuntansi

keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik bagi UKM, sedangkan pada penelitian ini mengenai pemahaman para pelaku UKM terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

2. Fidiana (2011)

Fidiana(2011) meneliti tentang “Tingkat Pemahaman Terhadap SAK ETAP: Studi Empiris Pada Mahasiswa Yang Berasal Dari SMK Dan SMA”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi STIESIA Surabaya berdasarkan asal sekolah menengah.

Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu mahasiswa semester tiga tahun ajaran semester gasal 2011/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pemahaman standar akuntansi keuangan berdasarkan latar belakang asal sekolah menengah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidiana(2011) adalah sama-sama meneliti tingkat pemahaman standar akuntabilitas keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidiana(2011) adalah pada penelitian Fidiana(2011) meneliti tentang perbedaan pemahaman standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pemahaman standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik para pelaku UKM.

3. Adityawan Salam(2010)

Salam(2010) meneliti tentang “Analisis Persepi Akuntan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat relevansi dan efektivitas dari penerapan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi UMKM ditinjau dari persepsi akuntan dan untuk melihat sejauhmana perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan manajemen terhadap SAK ETAP.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi akuntan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) relevan diterapkan pada lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Persepsi akuntan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah efektif diterapkan pada lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan tidak ada perbedaan antara persepsi akuntan publik dengan akuntan manajemen terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam(2010) adalah sama-sama meneliti tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UKM.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam(2010) adalah pada penelitian Salam(2010) meneliti tentang persepsi akuntan terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, sedangkan pada penelitian ini meneliti pemahaman para pelaku UKM terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

4. Wahdini dan Suhairi (2006)

Wahdini dan Suhairi(2006) meneliti tentang “Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi akuntan yang bekerja di bank

dan kantor pajak tentang kebutuhan usaha kecil dan menengah dan perusahaan besar dalam acuan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan.

Populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu akuntan yang bekerja di bank dan kantor pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM di Indonesia disebabkan persamaan standar akuntansi keuangan yang digunakan UKM dan perusahaan besar sehingga akan memberatkan usaha kecil dan menengah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahdini dan Suhairi(2006) adalah sama-sama meneliti tentang standar akuntansi keuangan bagi usaha kecil dan menengah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahdini dan Suhairi(2006) adalah pada penelitian Wahdini dan Suhairi(2006) menganalisis persepsi akuntan yang bekerja di bank dan kantor pajak, sedangkan pada penelitian ini tentang pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah

Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah (UU UKM) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha menurut Undang-Undang UKM Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Kriteria usaha kecil:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2) Kriteria usaha menengah:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2.2.2 Definisi Pemahaman

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia paham memiliki arti pandangan atau pandai dan mengerti benar (Depdiknas, 2008:998). Sedangkan pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau memahamkan. Fidiana (2011) berpendapat bahwa berarti orang yang memiliki pemahaman standar akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar standar akuntansi. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, menyajikan, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan. Di dalam ranah kognitif, Bloom (1956) menunjukkan tingkatan-tingkatan kemampuan yang dicapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Menurut Silverius (1991) pemahaman dibagi menjadi tiga bagian. Antara lain:

1. Menerjemahkan

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Melainkan juga mengubah bentuk, menyebut dengan kata-kata sendiri, menggambarkan, menyiapkan, menunjukkan, mengubah, mengatakan dengan cara lain, mengemukakan

kembali. Contoh: dapat mengartikan, mendefinisikan, menggambarkan sesuatu dan dapat memberikan contoh

2. Menginterpretasi

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Misalkan: mengurutkan, membedakan, membuat, menerangkan dan mempertunjukkan

3. Mengekstrapolasi (Perhitungan)

Pada tingkatan ekstrapolasi berbeda dengan menerjemahkan dan menginterpretasi dan sifatnya lebih tinggi. Contoh: menghitung, memberikan pandangan, menyimpulkan, menentukan, mengisi dan membuat perhitungan.

Menurut Fidiana(2011) pemahaman akuntansi berarti kemampuan untuk mengukur, mengklasifikasikan (membedakan), dan mengikhtisarkan (menyajikan) unsur-unsur laporan keuangan. SAK ETAP adalah suatu standar akuntansi yang digunakan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Maka pemahaman SAK ETAP merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK ETAP. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari.

Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

2.2.3 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

2.2.3.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi saat ini, memiliki pengertian yang beraneka ragam menurut pandangan masing-masing ahli yang memberikan definisi terhadap akuntansi. Definisi akuntansi secara umum menurut Financial Accounting Standart Board (FASB) adalah suatu aktifitas yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Beberapa definisi lain oleh beberapa ahli diantaranya :

1. Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) akuntansi dalam Harahap (2006:5) diartikan sebagai berikut:

Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

2. Menurut AICPA dalam Harahap(2006 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat hasil-hasilnya.

3. Menurut Wulan dan Nindita(2009), Akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

2.2.3.2 Standar Akuntansi Keuangan

Dalam kamus bahasa Indonesia (2008: 1460) standar adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Dengan adanya standar atau aturan yang ada, maka hal ini dapat mendorong perkembangan akuntansi khususnya akuntansi bagi usaha kecil dan menengah. Standar akuntansi keuangan disusun oleh organisasi profesi akuntansi yang bertujuan agar daftar keuangan menjadi lebih objektif, jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Standar akuntansi adalah konsep yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standart untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan. (Abrory,2010).

2.2.3.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Tingginya jumlah UKM, lemahnya akses ke perbankan serta hadirnya program konvergensi IFRS (principal based) menuntut timbulnya SAK ETAP. Ini sesuai dengan anjuran World Bank, yang menyatakan bahwa tiap negara,

minimum mempunyai dua standar akuntansi (standar untuk perusahaan publik dan standar untuk entitas non publik). Pengguna PSAK umum adalah entitas publik, jumlahnya tak sampai satu permil dari seluruh entitas di Indonesia, sedangkan pengguna SAK ETAP diperkirakan 24 persen dari seluruh entitas di Indonesia.

SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk UKM dibandingkan dengan PSAK umum. Perbedaan dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. SAK ETAP berbeda cukup signifikan dengan IFRS for SMEs (Small and Business Enterprises). Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Keunggulan yang ada pada SAK ETAP ini adalah : *Stand alone accounting standard* (tidak mengacu ke SAK Umum), mayoritas menggunakan *historical cost concepts*, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan UMKM, pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum (alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana dan penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran) serta tidak akan berubah selama beberapa tahun (Rahmi,2011).

SAK-ETAP ini berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit*

and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP (Roy, 2011).

2.2.4 Pemahaman SAK ETAP

Menurut Fidiana (2011) pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dibentuk oleh tiga hal:

2.2.4.1 Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut (IAI, 2009):

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian

harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan. Yadiati(2010:65) mengatakan definisi pengakuan yaitu proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu ke dalam laporan keuangan atau berapa jumlah rupiah suatu item harus dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pengakuan antara lain:

1. Definitions(definisi) artinya item-item tersebut harus memenuhi unsure-unsur laporan keuangan
2. Measureability(keterukuran) artinya item-item tersebut harus mempunyai atribut yang relevan dengan tingkat keandalan yang tinggi atau untuk menentukan keandalan daya ujinya.
3. Relevance(relevan) artinya informasinya harus mendukung dan memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan
4. Realibility(dapat diandalkan) artinya informasinya menyajikan keadaan yang sebenarnya, wajar, jujur, berdaya uji, dan netral.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik mengatur ketentuan pengakuan pos-pos dalam laporan keuangan antara lain:

Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan Aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur denganandal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau

kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

2.2.4.2 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu (IAI, 2009). Sedangkan Yadiati (2010: 65) mengemukakan pengukuran merupakan pemetaan (*mapping*) suatu angka kepada obyek atau peristiwa menurut aturan tertentu. Akuntansi merupakan pengukuran dari peristiwa dan transaksi-transaksi bisnis dari entitas yang telah diidentifikasi dengan angka-angka dan atribut yang relevan.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar (IAI, 2009).

1. Biaya historis; aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Adapun konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi antara lain:

- a. Konsep *matching*, untung/rugi selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut
- b. Sifat pengukuran mengacu kepada sifat-sifat aset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Sifat-sifat yang harus diukur yakni: nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan diperoleh atau dibayarkan, relevansi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi, kemampuan aset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi, sifat pengukuran alternatif tetapi nilai setara kas.

Kedua konsep tersebut merupakan dasar bagaimana suatu unsur dalam laporan keuangan harus diakui dan diukur.

2.2.4.3 Penyajian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyajian merupakan proses, cara, dan perbuatan menyajikan. Penyajian suatu laporan keuangan dimaksudkan bagaimana laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan (Harahap, 2007: 267). Fidiana(2011) berpendapat penyajian laporan keuangan entitas ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen entitas sebagai wujud akuntabilitas keuangan. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan

kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban (IAI, 2009). Sesuai dengan SAK ETAP, entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.

2.2.5 Penyajian Laporan Keuangan Lengkap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

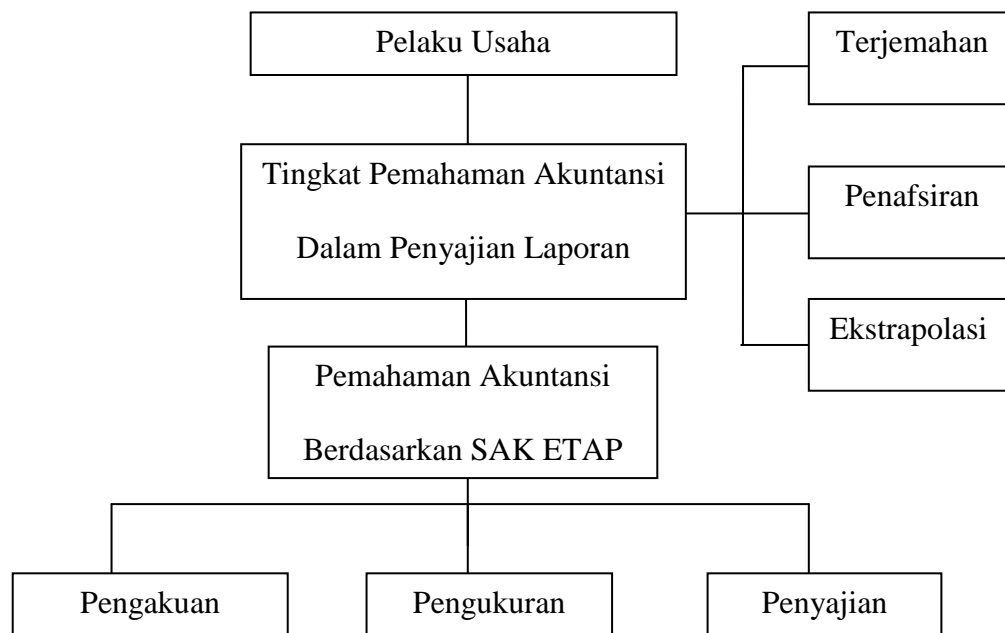
1. Laporan keuangan entitas meliputi:
 - (a) neraca;
 - (b) laporan laba rugi;
 - (c) laporan perubahan ekuitas
 - (d) laporan arus kas; dan
 - (e) catatan atas laporan keuangan
2. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:
 - (a) kas dan setara kas;
 - (b) piutang usaha dan piutang lainnya;
 - (c) persediaan;
 - (d) properti investasi;
 - (e) aset tetap;
 - (f) aset tidak berwujud;

- (g) utang usaha dan utang lainnya;
 - (h) aset dan kewajiban pajak;
 - (i) kewajiban diestimasi;
 - (j) ekuitas.
3. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:
- (a) pendapatan;
 - (b) beban keuangan;
 - (c) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
 - (d) beban pajak;
 - (e) laba atau rugi neto.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pelaku usaha kecil dan menengah terhadap akuntansi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disajikan pada gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Peneliti ingin menjelaskan tujuan penelitian melalui kerangka pemikiran di atas yaitu bagaimana tingkat pemahaman akuntansi menurut pelaku UKM dan apakah pemahaman akuntansi pelaku UKM sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Pemahaman akuntansi yang menjadi fokus peneliti, dimana peneliti ingin mengungkapkan fenomena yang terjadi bahwa pelaku UKM mempunyai pemahaman akuntansi yang berbeda-beda. Adanya SAK ETAP merupakan upaya untuk mempermudah UKM dalam menyusun laporan keuangan. Hal yang baru, tentu akan menimbulkan pro dan kontra, dari situ peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pelaku UKM dalam menyikapi mengenai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik.